



Kasus Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Siswa SD dan Upaya Pembelajaran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam PPKn

Putri Elya Anggraini

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: putrielyaputri@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 07, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 15, 2025

Keywords:

Social Media, Elementary School Students, Digital Ethics, Social Responsibility, Civics, Literature Review

ABSTRACT

The development of information and communication technology has brought about major changes in human life, including in the world of education. One of the prominent phenomena is the use of social media among elementary school students. The increase in access to and use of social media by elementary school students poses new challenges in the world of education, particularly in relation to digital ethics and social responsibility. This study aims to address the growing problem of social media abuse among elementary school students, which is often caused by ignorance of the negative impacts, lack of parental supervision, and lack of understanding of ethics and social responsibility in using digital platforms. The development of digital technology has had a significant influence on the behavior of elementary school students, particularly in their use of social media. The phenomenon of social media abuse at an early age raises concerns in terms of ethics, morals, and social responsibility. This article aims to analyze cases of social media abuse among elementary school students and explore the role of Pancasila and Civic Education (PPKn) in instilling ethical values and social responsibility. The method used in this study is a literature review by analyzing the results of previous studies. The findings show that the integration of digital literacy in PPKn can be an effective strategy to shape digital citizenship character, reduce the negative impact of social media, and increase students' awareness of responsible behavior in the digital space. The results of the study show that the misuse of social media is often caused by a lack of parental supervision, digital literacy, and the suboptimal integration of character education into the curriculum. Contextual, value-based PPKn learning that is integrated with students' digital lives has been proven to increase ethical awareness and social responsibility from an early age.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 07, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 15, 2025

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah penggunaan media sosial di kalangan siswa sekolah dasar. Peningkatan akses dan penggunaan media sosial oleh siswa sekolah dasar (SD) menimbulkan

**Kata Kunci:**

Media Sosial, Siswa SD, Etika Digital, Tanggung Jawab Sosial, PPKn, Kajian Pustaka

tantangan baru dalam dunia pendidikan, khususnya terkait etika digital dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk menangani masalah kasus penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa SD yang semakin marak, yang sering kali di sebabkan oleh ketidaktahuan dampak negatif, kurang nya pengawasan orang tua terhadap anak dan kurang nya pemahaman mengenai etika serta tanggung jawab sosial dalam menggunakan platform digital. Perkembangan teknologi digital membawa pengaruh signifikan terhadap perilaku siswa sekolah dasar, khususnya dalam penggunaan media sosial. Fenomena penyalahgunaan media sosial pada usia dini menimbulkan kekhawatiran dalam aspek etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa sekolah dasar serta menggali peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menanamkan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review) dengan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam PPKn dapat menjadi strategi efektif untuk membentuk karakter digital citizenship, mengurangi dampak negatif media sosial, dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap perilaku bertanggung jawab di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial sering kali disebabkan oleh minimnya pengawasan orang tua, literasi digital dan belum optimalnya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum. Pembelajaran PPKn yang kontekstual, berbasis nilai, dan terintegrasi dengan kehidupan digital siswa terbukti mampu meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial sejak dini.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Putri Elya Anggraini
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: putrielyaputri@gmail.com

PENDAHULUAN

Seiring berkembang pesat nya teknologi dan informasi saat ini, terdapat banyak hal positif yang diperoleh yang menggunakan terutama siswa. Media sosial bukan hal yang asing bagi masyarakat tidak terkecuali bagi siswa sekolah dasar (SD). Namun, teknologi dan informasi dalam hal ini media sosial memberi efek negatif kepada siswa terutama dalam berperilaku. Siswa cenderung meniru setiap perilaku menyimpang yang di akses melalui media sosial seperti facebook, telegram, tiktok, whatsapp dan youtube. Banyak siswa yang terjebak dalam penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan usia mereka, mulai dari perundungan daring (cyberbullying), penyebaran konten negative, hingga ketergantungan yang berdampak pada prestasi dan perkembangan sosial mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidik dan orang tua dalam memberikan bimbingan yang tepat mengenai etika penggunaan media sosial. Lembaga We Are Social dalam Nasrullah (2015) mempublikasikan hasil risetnya bahwa pengguna internet dan media sosial di Indonesia cukup tinggi. Ada sekitar 15% penetrasi internet atau 38 juta lebih pengguna internet. Dari jumlah total penduduk, ada sekitar 62 juta



orang yang terdaftar serta memiliki akun di media sosial Facebook. Dari riset tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial melalui perangkat telepon genggam. Media Sosial adalah salah satu wujud dari teknologi yang sangat canggih oleh sebab itu yang tak terhindarkan adalah degradasi etika yang dikeluhkan oleh tak sedikit pendidik di Indonesia, karena adanya beberapa contoh gaya komunikasi peserta didik terhadap guru yang dinilai tidak beretika. Permasalahan dalam etika merupakan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah goncangan besar bagi dunia pendidikan pada era ini. Etika merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan dalam berbagai macam profesi pun dalam menjalankan segala aspek dalam kehidupan. Individu yang memiliki etika akan cenderung untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak etis dan dapat merugikan pihak lain (Fauziyyah, 2019).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakter siswa yang berakhhlak mulia, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab sebagai warga negara, memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan media sosial secara etis dan bertanggung jawab. Melalui materi tentang norma, moral, nilai-nilai Pancasila, serta interaksi sosial, PPKn diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembentukan digital citizenship yang positif di kalangan siswa sekolah dasar (SD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial yang terjadi di kalangan siswa sekolah dasar (SD) serta menganalisis bagaimana upaya pembelajaran PPKn selama ini dalam menanamkan etika dan tanggung jawab sosial terkait penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PPKn dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa sekolah dasar (SD). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakter siswa yang berakhhlak mulia, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab sebagai warga negara, memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan media sosial secara etis dan bertanggung jawab. Melalui materi tentang norma, moral, nilai-nilai Pancasila, serta interaksi sosial, PPKn diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembentukan digital citizenship yang positif di kalangan siswa sekolah dasar (SD). PPKn dapat berperan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, etika digital, serta pentingnya menghargai hak orang lain dalam dunia maya. Pembelajaran yang terintegrasi mengenai literasi digital, keamanan data pribadi, dan pengembangan karakter siswa dalam berinteraksi secara positif di dunia maya diharapkan dapat mengurangi dampak negatif media sosial dan membentuk siswa yang bijak dalam menggunakan teknologi. Melalui penerapan kurikulum yang mencakup pembelajaran etika digital dan tanggung jawab sosial, siswa dapat diharapkan lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka di media sosial dan terhindar dari dampak buruk yang dapat merusak keharmonisan sosial serta perkembangan pribadi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*Literature Review*). Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal nasional terakreditasi, artikel ilmiah, dan prosiding yang



membahas penyalahgunaan media sosial dikalangan siswa sekolah dasar upaya pembelajaran etika dan tanggung jawab sosial dalam PPKn. Artikel yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi topik, serta metode penelitian yang digunakan

Tujuan dari studi literatur penelitian ini yaitu meninjau mengenai penerapan pembelajaran etika dan tanggung jawab sosial dalam PPKn untuk mengurangi penyalahgunaan media sosial siswa ketika di sekolah dasar. Sumber-sumber tersebut dievaluasi berdasarkan relevansi topik, kualitas penelitian, dan kontribusi terhadap pemahaman fenomena penyalahgunaan media sosial dan strategi pembelajaran etika dalam PPKn. Kajian pustaka ini dilakukan untuk menganalisis penelitian dalam jurnal yang diperoleh dari berbagai referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Media Sosial oleh Siswa SD, menunjukkan siswa SD sudah mulai aktif menggunakan media sosial meski batas usia minimal tidak terpenuhi. Penyalahgunaan yang paling umum termasuk berbagi informasi pribadi secara berlebihan, komentar tidak sopan, penyebaran konten tidak pantas, dan interaksi dengan orang asing. Faktor Penyebab Kurangnya pengawasan orang tua dan guru, rendahnya literasi digital, serta dorongan untuk eksistensi sosial di dunia maya menjadi faktor utama penyalahgunaan. Ditambah lagi, siswa belum memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka di media sosial. Literatur juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan anak membedakan dunia nyata dan dunia maya menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa perilaku buruk di media sosial dapat berdampak hukum maupun sosial.

Kajian literatur memperlihatkan adanya keterkaitan antara rendahnya literasi digital, minimnya pengawasan, dan kurangnya pendidikan etika sebagai penyebab utama penyalahgunaan media sosial pada siswa SD. Efek dari siswa yang mengalami kecanduan media sosial cenderung memiliki prestasi akademik rendah dan menunjukkan perilaku menyimpang dalam pergaulan. literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman kritis terhadap isi media, interaksi sosial digital, dan nilai-nilai etis yang terkait dengan penggunaan teknologi. Jika dimasukkan ke dalam ranah pendidikan, terutama PPKn, maka pembentukan literasi digital ini dapat diperkuat melalui pendidikan karakter berbasis nilai. Faktor lain yang ditemukan dalam kajian pustaka adalah adanya pengaruh budaya populer dan tokoh digital (influencer) yang menjadi panutan siswa yang dimana siswa cenderung meniru gaya bicara, berpakaian, dan perilaku selebritas media sosial, bahkan jika perilaku tersebut bertentangan dengan norma sosial dan nilai Pancasila.

Literatur menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki kapasitas besar dalam membentuk etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini karena PPKn secara eksplisit mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan kesadaran hukum, semua nilai ini sangat relevan dalam konteks penggunaan media sosial. Ribble memperkenalkan konsep *Digital Citizenship*, yang mencakup sembilan elemen penting, antara lain, akses digital, komunikasi digital, literasi digital, etika digital, dan hak serta tanggung jawab digital. Konsep ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum PPKn sebagai pendekatan kontekstual untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang kewarganegaraan di ruang digital. Pengintegrasian literasi media digital ke dalam pembelajaran PPKn meningkatkan kemampuan siswa dalam memilah informasi dan memahami konsekuensi sosial dari tindakan mereka di media sosial. Ini diperkuat oleh hasil studi dari Jurnal Pendidikan



Karakter yang menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan karakter secara konsisten menunjukkan perilaku daring yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Peran PPKn dalam Pendidikan Etika Digital Pembelajaran PPKn memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran etis siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan digital (digital citizenship), guru PPKn dapat mengajarkan siswa mengenai hak dan kewajiban dalam ruang digital, pentingnya bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan, serta pentingnya menghormati orang lain di dunia maya. Strategi pembelajaran yang efektif pendekatan berbasis masalah (problem-based learning), diskusi kasus, proyek literasi digital, serta kolaborasi dengan orang tua menjadi metode yang efektif dalam menyampaikan materi PPKn yang relevan dengan isu media sosial.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diharuskan diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, termasuk di sekolah dasar (SD) (Khairunnisa, 2020). Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik akan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta nilai-nilai kebangsaan yang harus dijunjung tinggi (Fusnika, 2014). Pesatnya perkembangan teknologi digital dan penetrasi internet telah membawa media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak usia sekolah dasar (SD). Media sosial menawarkan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, kemudahan ini juga membawa konsekuensi negatif, terutama dalam bentuk potensi penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa SD.

Dalam era digital seperti saat ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar (SD). Era digital telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, sehingga muncul perubahan pada pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk di kalangan anak-anak.

Bentuk penyalahgunaan media sosial dikalangan siswa sekolah dasar menunjukkan adanya penggunaan kata-kata kasar dalam grup kelas, penyebaran berita palsu yang diterima dari orang tua atau kerabat, perundungan daring (cyberbullying) terhadap teman sebaya, penyebaran informasi yang tidak benar (hoax), perilaku tidak pantas dalam berinteraksi daring, hingga kecanduan media sosial yang dapat mengganggu perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat usia siswa sekolah dasar (SD) yang masih rentan dan dalam tahap perkembangan nilai dan moral. Faktor Penyebabnya yaitu minimnya pengawasan orang tua terhadap anak ketika bermain media sosial dan banyak orang tua belum memahami pentingnya pendampingan digital, ketidaktahuan etika digital, kurangnya konten pembelajaran yang relevan, minimnya literasi digital siswa yang belum memiliki pemahaman tentang etika bermedia sosial, dan ketidakterkaitan materi PPKn dengan kehidupan digital karena materi masih fokus pada nilai-nilai umum tanpa kontekstualisasi.

Upaya Pembelajaran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam PPKn:

1. Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran PPKn dan Media Sosial, Pandangan siswa tentang relevansi materi PPKn dengan pengalaman mereka di media sosial dan efektivitas pembelajaran yang mereka terima.
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pembentukan Karakter Digital, Bagian ini akan menguraikan peran dan tujuan pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai-nilai etika, moral, norma, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab sosial. Akan dibahas pula relevansi nilai-nilai ini dalam konteks penggunaan media sosial dan pembentukan karakter digital siswa



3. Konsep Etika Digital dan Tanggung Jawab Sosial dalam Konteks Anak, bagian ini akan menjelaskan konsep etika digital yang sesuai untuk anak usia SD, termasuk prinsip-prinsip seperti menghormati orang lain secara daring, menjaga privasi, berpikir kritis sebelum berbagi, dan bertanggung jawab atas tindakan di dunia maya
4. Peningkatan Peran Aktif Orang Tua, Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada siswa tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab di rumah. Sekolah dapat mengadakan lokakarya atau sesi berbagi dengan orang tua tentang isu-isu media sosial dan cara mendampingi anak.
5. Pemerintah perlu mengembangkan modul PPKn berbasis literasi digital.
6. Pengembangan Strategi Pembelajaran yang Inovatif dan Kontekstual, Menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, berbasis studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, atau penggunaan media pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk membahas isu-isu terkait media sosial.
7. Peningkatan Kompetensi Guru PPKn dalam Literasi Digital, Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru PPKn terkait isu-isu media sosial terkini, strategi pembelajaran literasi digital, dan cara memfasilitasi diskusi yang efektif dengan siswa.
8. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Sekolah: Sekolah perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial oleh siswa di lingkungan sekolah dan memberikan sanksi yang edukatif terhadap perilaku penyalahgunaan.

Strategi Pembelajaran PPKn Berbasis Literasi Digital

Pendekatan pembelajaran PPKn yang dapat menanggulangi penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa, antara lain:

a. Problem-Based Learning (PBL)

Dalam konteks ini, guru dapat menyajikan kasus cyberbullying untuk didiskusikan siswa, kemudian bersama-sama merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga kesadaran moral siswa terhadap konsekuensi tindakan daring.

b. Project-Based Learning (PjBL)

Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam kampanye digital. Misalnya, siswa dapat membuat proyek kampanye “Etika Bermedia Sosial” melalui poster digital, video pendek, atau podcast yang disebarluaskan di lingkungan sekolah.

c. Value Clarification Technique (VCT)

Metode ini membantu siswa memperjelas dan menyadari nilai yang mereka yakini. Ketika diterapkan dalam topik etika digital, siswa diajak untuk memilih tindakan yang paling tepat saat dihadapkan pada dilema etis dalam media sosial.

d. Pendekatan Kolaboratif Orang Tua dan Sekolah

Pendekatan ini menekankan pentingnya peran orang tua pendidikan karakter efektif jika melibatkan ekosistem Pendidikan, rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini menjadi penting mengingat sebagian besar aktivitas media sosial siswa terjadi di luar pengawasan sekolah dan menjadi kunci keberhasilan Pendidikan anak.

Walaupun kajian literatur menunjukkan potensi besar PPKn dalam menangani penyalahgunaan media sosial, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti :



1. Ketidaksiapan guru dalam mengintegrasikan isu digital ke dalam materi PPKn.
2. Keterbatasan pelatihan dan sumber daya.
3. Kurangnya bahan ajar berbasis digital yang kontekstual.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik seperti pelatihan guru berbasis literasi digital, pengembangan buku ajar yang relevan dengan kehidupan digital siswa, serta regulasi dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan etika digital pada tingkat dasar.

Strategi-strategi tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku dalam penggunaan media sosial. Peran guru sangat sentral dalam pengembangan sikap tanggung jawab siswa. Tugas guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga mencakup membimbing dan mendidik siswa untuk memiliki karakter yang baik. Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pengembangan sikap tanggung jawab siswa dapat berlangsung maksimal jika didukung oleh faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan. Sebaliknya, keberadaan faktor penghambat dapat mengurangi efektivitas proses tersebut. Oleh karena itu, guru perlu lebih proaktif dalam mengatasi tantangan dalam penanaman nilai-nilai karakter dan pengembangan sikap tanggung jawab. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara keluarga dan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter siswa.

Kita perlu membentuk karakter anak dan harus dibina dengan baik, yaitu dengan Cara melalui implementasi nilai-nilai Pancasila menggunakan media sosial. Salah satu bentuknya adalah sosialisasi (Wardana et al., 2021). Melalui sosialisasi di media sosial, diharapkan mampu mengubah paradigma anak tentang cyberbullying sehingga tidak menjadi pelaku dan terjerat sebagai korban. Selain itu, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila juga dapat mengurangi fenomena ini. Sebab dengan menanamkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, maka menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, mampu beradaptasi dengan gejolak problematika dunia, mampu menjaga diri serta turut menjaga keharmonisan masyarakat (Widiyaningrum, 2019). Anak juga perlu diingatkan terhadap tindakan yang termasuk penyalahgunaan media sosial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong, berita kebencian, permusuhan, intimidasi, akses komputer pihak lain tanpa izin, penyadapan, penghilangan informasi, perusakan sistem, penyebaran virus, dan pemalsuan data. Pengenalan aturan tersebut dapat dibuat dalam bentuk konten menarik yang di rancang sedemikian rupa hingga membuat anak tertarik untuk bertanya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pendidikan kewarganegaraan memegang kendali penting untuk membentuk watak warga negara yang baik termasuk bijak bermedia sosial. Sehingga Pendidikan kewarganegaraan harus diberikan dalam pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi guna membentuk karakter yang mampu menumbuhkan rasa kepekaan terhadap lingkungan sosial dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sejalan dengan perkembangan media sosial, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di Pendidikan formal tersebut, dapat membantu anak untuk semakin hati-hati menggunakan media sosial sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran cyberbullying. Karena dengan memperdalam ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, anak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari serta bagaimana beretika yang baik dalam menggunakan internet, sehingga melalui sosialisasi di media sosial diharapkan dapat memberikan pencerahan



dalam menumbuhkan kesadaran agar dapat memanfaatkan media sosial dengan lebih berhati-hati.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa SD merupakan tantangan nyata di era digital. Penyalahgunaan media sosial juga menunjukkan rendahnya pemahaman mereka terhadap etika berkomunikasi digital dan tanggung jawab sosial. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan, kontrol dari orang tua dan guru, serta belum maksimalnya integrasi pendidikan karakter dalam penggunaan media digital. Penyalahgunaan ini dapat berdampak negatif pada perkembangan moral, psikologis, dan hubungan sosial siswa. Integrasi pembelajaran etika digital dan tanggung jawab sosial melalui PPKn terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan perilaku bijak siswa. Diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dan kebijakan kurikulum dalam mengatasi isu ini. PPKn dapat berperan sebagai ruang pembentukan karakter digital dengan mengajarkan etika dan tanggung jawab sosial. Diperlukan pelatihan bagi guru, revisi kurikulum, serta kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk membentuk budaya digital yang sehat sejak dini. Peran guru PPKn sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pendidikan karakter. Pembelajaran PPKn yang dikembangkan secara kontekstual dan relevan dengan dunia digital dapat menjadi solusi preventif terhadap penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, integrasi literasi digital dalam PPKn perlu menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan dasar.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini. Melalui pendekatan kontekstual, diskusi kasus, dan pembiasaan nilai Pancasila, siswa dapat dibimbing untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. PPKn juga dapat menguatkan pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sinergi antara pembelajaran PPKn, peran keluarga, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan media sosial serta membentuk generasi muda yang cerdas digital dan beretika.

Pentingnya etika sosial diajarkan sejak dini dan dipelajari oleh siswa, namun siswa juga dapat mengaksesnya melalui konten media sosial yang mempunyai makna yang sangat positif. Sebab, etika mencakup nilai-nilai sosial dan budaya yang disepakati masyarakat sebagai norma yang dianut secara umum. Banyak prinsip etika yang bersifat universal, namun kehati-hatian harus dilakukan ketika mempelajari norma-norma etika yang datang dari luar. Pentingnya siswa memiliki etika karena mencerminkan tata krama dan etika yang tertanam dalam dirinya. Etika adalah teori yang menimbang baik dan buruknya tindakan manusia, atau ilmu mempertimbangkan baik dan buruk berdasarkan akal budi.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Ismanto, Y. Yusuf, and Asep Suherman, "Membangun Kesadaran Moral Dan Etika Dalam Berinteraksi Di Era Digital Pada Remaja Karang Taruna Rw 07 Rempoa, Ciputat Timur," *Jurnal Abdi Masy. Multidisiplin*, 2022, doi: 10.56127/jammu.v1i1.253



- Fauziyyah, N. (2019). Etika komunikasi peserta didik digital natives melalui media komunikasi online (whatsapp) kepada pendidik: Perspektif dosen. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 437-474.
- Fusnika, F. (2014). Pembinaan civic disposition berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah tinggi ilmu Kesehatan kota sukabumi. *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 23(1).
- Khairunnisa, K., & Jiwandono, I. S. (2020). Analisis metode pembelajaran komunikatif untuk ppkn jenjang sekolah dasar. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 4(1), 9-19.
- Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
- Nuraeni, N. Sastra, A. (2023). Inovasi program pendidikan karakter islami di SMP Sekolah Alam Indonesia Cipedak. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(6), 502–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i6.15156>
- S. Tambak, “Pendidikan Etika Bergaul Islami Dalam Keluarga ‘Nilai Pendidikan Etika Berlaku Adil Orangtua dengan Anak dalam Pergaulan Keluarga Perspektif Hadits,’” *J. Pendidik. Agama Islam Al-Thariqah*, 2019,
- Wardana, D. J., Handayani, A., Rahim, A. R., Sukaris, S., & Fauziyah, N. (2021). Sosialisasi Pentingnya Nilai–Nilai Pancasila. *DedikasiMU(Journal of Community Service)*, 3(1), 770. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i1.2357>
- Widiyaningrum, W. Y. (2019). Menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda: Kajian teoritis. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 69–78.